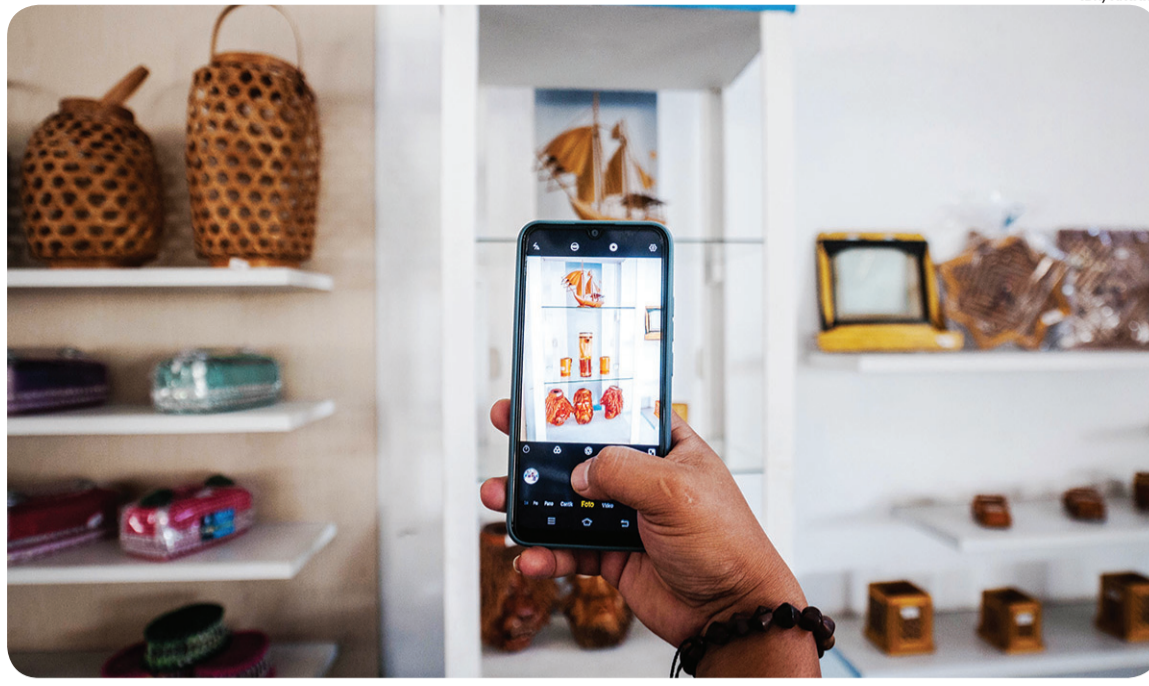


PROGRAM AKSELERASI DIGITAL PELAKU EKONOMI KREATIF

Pekerja memotret produk kerajinan di Plaza Lebak, Banten, Jumat (27/8). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan akan melanjutkan dan mempercepat program akselerasi digital bagi pelaku ekonomi kreatif melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan target mendigitalisasi 30 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebelum tahun 2023.



IDN/ANTARA

Optimalisasi Pembangunan PLTS Atap, Sasar Rumah Tangga dan Industri

Dadan Kusdiana mengatakan, pembangunan PLTS atap berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja. Lalu, peningkatan investasi dengan potensi Rp45 triliun sampai Rp63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp2,04 triliun sampai dengan Rp4,08 triliun untuk pengadaan kWh ekspor impor.

JAKARTA (IM) - Kementerian ESDM menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bisa mencapai 3,6 gigawatt (GW) dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan optimalisasi pengembangan PLTS atap akan bertumpu pada sektor rumah tangga dan industri guna memaksimalkan pencapaian target tersebut.

"Jadi, sebenarnya (PLTS atap) nanti akan bertumpu pada sektor rumah tangga dan juga industri," kata Dadan dalam diskusi daring PLTS atap di Jakarta, Jumat (27/8).

Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, target pengembangan PLTS atap untuk sektor rumah tangga selama empat tahun ke depan memiliki potensi daya listrik sebesar 1,52 GW.

Asumsi jumlah pelanggan

PLN yang akan memasang PLTS atap dengan target dua persen dari pelanggan 1.300 VA dan 10 persen dari pelanggan 2.200 VA.

Sedangkan, dari sektor bisnis, pemerintah memperkirakan ada potensi 1,3 GW energi hijau itu dengan rincian 10 persen pelanggan PLN 1.300 VA sampai 14 kVA dan 20 persen pelanggan di atas 14.000 kVA juga memasang PLTS atap.

Hanya memang, upaya pemerintah mendorong pemanfaatan PLTS atap akan berdampak pada keuangan PT PLN (Persero). Jika pengembangan PLTS atap tembus 3,6 giga watt (GW), maka PLN berpotensi kehilangan pendapatan Rp5,7 triliun per tahun.

Dadan menjelaskan, pemanfaatan PLTS atap tersebut akan berdampak para pengurangan penggunaan batu bara sebesar 2.978.813 ton. Dampak selanjutnya ialah pendapatan PLN akan ber-

potensi berkurang sebanyak Rp5,7 triliun atau sebesar 2,21% per tahun.

"Kemudian dari sisi pengusaha listrik betul, bahwa nanti akan berpotensi mengurangi pendapatan PLN. Kalau kita hitungnya angka 3,6 GW ini berkurangnya Rp5,7 triliun. Kalau 1 GW ya Rp5,7 triliun di bagi 3,6 angkanya sekitar barangkali Rp1,2 triliun atau Rp1,3 triliun," kata Dadan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa karena terjadi produksi sendiri ya konsumsi ke PLN-nya akan berkurang tapi ini adalah bukan kerugian. Ini adalah potensi berkurangnya

pendapatan PLN dari konsumen yang memanfaatkan PLTS atap," ujarnya.

Dampak lainnya adalah penambahan tenaga kerja. Menurutnya, pembangunan PLTS atap ini berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja. Lalu, peningkatan investasi dengan potensi Rp45 triliun sampai Rp63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp2,04 triliun sampai dengan Rp4,08 triliun untuk pengadaan kWh ekspor impor.

Pemanfaatan PLTS atap juga berpotensi menurunkan subsidi dan kompensasi de-

ngan rincian subsidi Rp0,9 triliun dan kompensasi Rp2,7 triliun.

Sementara, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, proyeksi pemanfaatan PLTS 3,6 GW ini tidak terjadi dalam waktu dekat, melainkan beberapa tahun ke depan.

"3,6 GW dalam hal ini tentu saja tidak hari ini atau besok saja, tapi mungkin ini diproyeksikan akan tumbuh secara bertahap hingga tahun 2024 atau 2025 paling lambat," ujarnya. • dro

Kemenperin Sebut Sektor Kritis Berperan Penting Pulihkan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Sebanyak 70 persen perusahaan di industri agro merupakan sektor yang masuk kategori kritis. Selama masa pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sektor industri ini mendapat izin untuk beroperasi penuh dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

"Industri kritis memang dijaga aktivitas produksinya karena untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, serta berperan penting dalam memulihkan ekonomi nasional," kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika di Pati, Jawa Tengah, Jumat (27/8).

Putu menjelaskan, salah satu sektor kritis yang dipacu adalah industri gula. Kebutuhan komoditas olahan tebu ini terus meningkat, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri. "Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6 juta ton per tahun, yang terdiri dari 2,7-2,9 juta ton gula konsumsi, dan 3-3,2 juta ton untuk gula kebutuhan industri," ungkapnya.

Dari total kebutuhan tersebut, rata-rata produksi gula konsumsi (gula kristal putih) di dalam negeri sebesar 2,1-2,2 juta ton, dan produksi nasional gula kebutuhan industri (gula kristal rafinasi) sebesar 3-3,2

juta ton. Oleh karenanya, Kemenperin fokus pada kebijakan pengembangan industri gula di tanah air agar lebih produktif dan berdaya saing. Selain itu, mendorong pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi dengan perkebunan tebu.

Pada saat ini, terdapat 62 pabrik gula berbasis tebu dengan kapasitas terpasang nasional mencapai 316.950 ton tebu per hari (TCD). Apabila seluruh pabrik gula tersebut berproduksi optimal dan efisien, dapat memproduksi gula sekitar 3,5 juta ton per tahun. "Hal ini berarti kebutuhan untuk gula konsumsi sudah dapat terpenuhi," tutur Putu.

Guna memantau langsung aktivitas industri gula saat PPKM, Plt. Dirjen Industri Agro melakukan kunjungan kerja di Pabrik Gula Trangkil di Pati, Jawa Tengah, Kamis (26/8). Kegiatan ini juga untuk melihat penerapan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

"PG Trangkil adalah industri yang tergolong dalam kategori sektor kritis dan telah memiliki IOMKI yang diterbitkan oleh Kemenperin. Kami melihat langsung, PG Trangkil sudah memiliki pedoman dan fasilitas yang baik

dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Kami juga memberikan apresiasi karena perusahaan ini melaporkan IOMKI secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan," papar Putu.

Pemimpin PG Trangkil, Sukirno menyampaikan, pihaknya berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan secara ketat guna memutus mata rantai dan menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. "Langkah-langkah yang kami laksanakan antara lain adalah membentuk Satgas Covid-19, menyediakan alat genose, serta memastikan karyawan masuk lingkungan perusahaan menggunakan masker dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh," sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengemukakan, pihaknya turut melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di sektor industri. "Kami melihat peran pentingnya sektor industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun tak dapat dipungkiri, kesehatan dan keselamatan pegawai industri juga merupakan hal yang utama untuk terus dijaga dan ditingkatkan," tegasnya. • pan

IDN/ANTARA



PENINGKATAN PNBP SEKTOR PERIKANAN TANGKAP

Pekerja memilih ikan di Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta, Jumat (27/8). Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui usaha perikanan tangkap tahun 2021 sebesar Rp1 triliun dan ditargetkan terus meningkat menjadi Rp12 triliun pada tahun 2024.

BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes
Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

Penghimpunan Dana Pasar Modal Capai Rp136,9 Triliun

JAKARTA (IM) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya penguatan pasar modal Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih bertahan di level 6.000.

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Hoesen menyebutkan, angka tersebut terus menunjukkan penguatan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, berdasarkan per 24 Agustus 2021, penghimpunan dana di pasar modal pun terus meningkat hingga mencapai Rp136,9 triliun.

"Kondisi pasar modal Indonesia masih bergantung pada upaya penanganan Covid-19. Meski demikian, OJK menilai pelaku pasar sudah cukup siap dalam merespons hal tersebut sehingga tidak terjadi gejolak sebagaimana di tahun 2020. Terbukti sampai dengan saat ini, pasar masih bergerak sideways dengan tren IHSG masih bertahan di level 6.000 dan menunjukkan penguatan seiring dengan pemulihan nasional," ujar Hoesen dikutip dari Instagram @ojkindonesia, Jumat (27/8).

Hoesen dalam postingan tersebut menjelaskan, sepanjang tahun 2021 hingga 24 Agustus 2021, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 97 emisi. Ke-97 penawaran ini meliputi, 28 Penawaran Umum Perdana Saham, 19 Penawaran Umum Terbatas, 3 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, serta 49 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di tahap I dan tahap II. "Total keseluruhan nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp 136,9 triliun," katanya.

Dari 97 kegiatan emisi tersebut, 28 di antaranya merupakan emiten baru. Ke depan, Hoesen mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan seluruh pihak. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.

"OJK senantiasa bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders lainnya untuk terus menjaga stabilitas dan volatilitas pasar modal Indonesia," ujarnya. • dro

PT Brantas Energi Dapat Pendanaan dari SMI

JAKARTA (IM) - Anak usaha PT Brantas Abipraya (Persero), yakni PT Brantas Energi menandatangani nota kesepahaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) di Kantor Pusat Brantas Abipraya, Jakarta. Langkah itu bertujuan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minit hidro (PLTM) Maiting Hulu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

"Sinergi ini merupakan salah satu langkah nyata penerapan AKHLAK BUMN, kolaborasi antara anak usaha Abipraya dengan SMI untuk merealisasikan target pemerintah sesuai PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yaitu tercapainya bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025," ujar Direktur Utama Brantas Energi, Sutjipto, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8).

Brantas Energi telah membangun dua unit pembangkit hidro dan satu unit pembangkit tenaga surya dengan total kapasitas 14 Megawatt (MW). Di antaranya adalah PLTM Padang Guci di Bengkulu sebesar 3x2 MW, PLTM Sako-1 yang berlokasi di Sumatera Barat dengan daya 2x3 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gorontalo sebesar 2 MW.

Di samping itu, Brantas Energi tengah menyelesaikan pembangkit hidro berkapasitas 15 MW yaitu PLTM Padang Guci-2 yang berada di Kabupaten Kaur, Bengkulu sebesar 2x3,5 MW dan PLTM Maiting Hulu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, berkapasitas 2x4 MW. Kedua PLTM direncanakan akan berproduksi pada triwulan IV 2021 dan triwulan I 2022.

Sutjipto mengatakan, pembangunan unit pembangkit hidro tidak terlepas dari kerja sama dengan SMI sejak tahun 2018. Adapun ini merupakan kerja sama untuk ketiga kalinya. Ia menyebutkan, kerja sama dengan SMI diawali dengan pemberian fasilitas kredit investasi untuk membangun PLTM Sako-1 pada 2018. Selain itu, SMI memberikan kredit investasi untuk pembangunan PLTM Padang Guci-2. • dot